



Dinas Komunikasi dan Informatika
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RENCANA KERJA TAHUN 2026



diskominfo@padangpariamankab.go.id

diskominfo@padangpariamankab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja 2026 ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Parit Malintang, 29 Oktober 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



ZAHIRMAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda. NIP. 19710524 199703 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Penyusunan	9
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	13
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU RENJA DISKOMINFO	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika	48
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	53
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	54
3.2 Program Pembangunan Daerah yang mendukung Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026	57
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	62
 BAB V PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024	28
2.2	Tabel 2.2 (T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	36
2.3	Tabel Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	37
2.4	Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1	38
2.5	Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2	43
2.6	Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3	45
2.7	Tabel Capaian Kinerja Sasaran 4	47
2.8	Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)	48
2.9	Review terhadap Rancangan Awal RENJA Tahun 2026 (T-C 31)	51
3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja	57
3.2	Rumusan Rencana Program dan Pedanaan yang mendukung Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman Tahu 2026.	62
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2026	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja digunakan

sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang

berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (PD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja yang dihasilkan benar-benar

representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja dan dokumen

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

The diagram, titled "Hubungan Antar Dokumen" (Relationship Between Documents), illustrates the flow and interrelationships of various planning documents. It is organized into two main sections: a light blue shaded area on the left and a white area on the right.

Documents in the Light Blue Area:

- RPJM Nasional** (National Regional Medium-Term Development Plan) and **RKP** (Regional Medium-Term Development Plan) are at the top.
- RPJP Daerah** (Regional Medium-Term Development Plan) is on the left.
- RPJM Daerah** (Regional Medium-Term Development Plan) and **RKP Daerah** (Regional Medium-Term Development Plan) are in the center.
- Renstra SKPD** (SKPD Strategic Plan) and **Renja SKPD** (SKPD Action Plan) are at the bottom.

Documents in the White Area:

- RAPBD** (Regional Annual Budget Report) and **APBD** (Regional Annual Budget) are in the top right.
- RKA SKPD** (SKPD Annual Budget Report) and **DPA SKPD** (SKPD Annual Budget) are in the bottom right.

Relationships (Arrows and Labels):

- RPJM Nasional** to **RPJM Daerah**: Dotted arrow labeled "Diperhatikan" (Noticed).
- RKP** to **RKP Daerah**: Dotted arrow labeled "Diacu" (Referenced).
- RPJP Daerah** to **RPJM Daerah**: Solid arrow labeled "Pedoman" (Guideline).
- RPJM Daerah** to **RKP Daerah**: Solid arrow labeled "Dijabarkan" (Detailed).
- RKP Daerah** to **RAPBD**: Solid arrow labeled "Pedoman" (Guideline).
- RPJM Daerah** to **Renstra SKPD**: Solid arrow labeled "Pedoman" (Guideline).
- Renstra SKPD** to **Renja SKPD**: Dashed arrow labeled "Pedoman" (Guideline).
- RKP Daerah** to **Renja SKPD**: Solid arrow labeled "Bahan" (Material).
- Renja SKPD** to **RKA SKPD**: Dashed arrow labeled "Diacu" (Referenced).
- RKA SKPD** to **RAPBD**: Solid arrow.
- RAPBD** to **APBD**: Solid arrow.
- APBD** to **DPA SKPD**: Solid arrow.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara

menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang IT (informasi dan Telekomunikasi), maka Renja Dinas Kominfo akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas Telematika, Diseminsi Informasi kepada masyarakat, atau pelayanan pemerintah bersifat elektronik, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Komunikasi dan Informatika juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika . Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu

dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.1419);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017;

19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan; Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;

2. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
3. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026; dan
4. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra ,dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;
- 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- 2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Program Pembangunan Daerah yang mendukung Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026. Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Perihal pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Rencana Kerja dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman akan dibiayai dengan sumber dana APBD dengan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antar unit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024)

berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan		(Rp)	%
Nihil								

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan		(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100	100	100	Point	3.330.281.643	3.229.183.935	96,96
		100	100	100	Persentase			
		100	100	100	Persentase			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		97	97	100	Persentase	59.603.450	56.758.945	95,23
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	100	Laporan	41.793.750	39.023.744	93,37
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100	Laporan	17.809.700	17.735.201	99,58

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targe t	Realisa si	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan		100	100	100	Point	3.330.281.6	3.229.183.935	96,96

Daerah Kabupaten/ Kota		100	100	100	Persentase	43		
		100	100	100	Persentase			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	Persentase	96.650.000	72.322.260	95,99
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16	16	100	Orang	2.239.136.453	2.280.771.485	95,81
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	4	100	Laporan	101.520.000	103.800.000	100,00

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targe t	Realisa si	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		88	88 Point	100	Point	3.330.281.643	3.229.183.935	96,96
		100	100	100	Persentas e			
		100	100	100	Persentas e			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	Persentas e	170.962.300	168.582.442	98,61
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100	Paket	3.981.000	3.980.000	99,97
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	100	Paket	6.225.300	6.224.695	99,99
3	Penyediaan Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1	100	Paket	4.474.200	4.473.540	99,99
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60	100	Laporan	156.281.800	153.904.207	98,48

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100	100	100	Point	3.330.281.643	3.229.183.935	96,96
		100	100	100	Persentase			
		100	100	100	Persentase			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	Persentase	746.719.440	744.949.505	98,11
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	100	Item	24.320.400	24.170.465	99,38
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	13 Laporan	100	Orang	722.399.040	720.779.040	99,78

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	100	Point	3.330.281.643	3.229.183.935	96,96
		100	100	100	Persentase			
		100	100	100	Persentase			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	100	Point	3.330.281.643	3.229.183.935	96,96
		100	100	100	Persentase			
		100	100	100	Persentase			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	Persentase	12.340.000	12.145.000	98,42
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	3	100	Mobnas	6.820.000	6.795.000	99,63
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	3	100	Unit	5.520.000	5.350.000	96,92

b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	41	41	100	Persentase	1.169.230.000	1.167.445.738	99,85
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90	90	100	Persentase	1.169.230.000	1.167.445.738	99,85
1	Pengelolaan Media	10	10	100	Jumlah		29.969.150	99,9

	Komunikasi Publik	Dokumen		0		30.000.000		0
2	Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	5	100	Jumlah	10.000.000	9.781.900	97,82
3	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1 KIM	1	100	Jumlah	68.980.000	68.750.000	99,67
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	45 Dokumen	45	100	Jumlah	1.060.250.000	1.058.944.688	99,88

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	60%	60	100	Persentase	2.696.268.750	2.630.194.785	97,55
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	80	100	Pesentase	117.728.000	115.912.435	98,45
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	Dokumen	72.678.000	70.967.435	97,65
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1	1	100	Unit	10.180.000	10.180.000	100,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	10	10	100	PD	15.000.000	15.000.000	100,00
4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	5	5	100	Unit	10.000.000	9.895.000	98,95
5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1	1	100	Dokumen	9.870.000	9.870.000	100,00

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penyelenggaraan	Ters	Ters	100	Tersedia	9.240.000	9.168.700	Ada

Statistik Sektoral		edia	edia					
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		90	90	100	Persentase	9.240.000	9.168.700	99,23
1	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	10	10	100	Data	28.600.000	9.168.700	99,23

e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targ et	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral		15	15	100	Persentase	18.050.000	17.932.400	99,35
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2	2	100	Indeks	18.050.000	17.932.400	99,35
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10 Lapo ran	10	100	Laporan	9.000.000	8.962.400	60,38
2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10 OPD	10	100	OPD	9.050.000	8.970.000	

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targ et	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		60	62	100	Persentase	2.696.268.750	2.943.943.017	95,73
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		70	72	100	Persentase	2.578.540.750	2.514.282.350	98,70
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	1	1	100	sistem	2.578.540.750	2.514.282.350	98,70

	Pemerintah Daerah							
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Terdapatnya Perubahan Regulasi yang secara tidak langsung mengubah sistematis pelaksanaan Program dan Kegiatan pada PD;
- b. Ketersediaan SDM pengelola dan tenaga ahli yang kurang pada setiap lini teknis dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- c. Struktur penganggaran yang kurang support.

Namun demikian masih terdapat juga faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Terdapatnya Perubahan Regulasi yang secara tidak langsung mengubah sistematis penyusunan perencanaan pada PD;
- b. Lambatnya penyesuaian Pemertintah Daerah dalam beradaptasi dengan perubahan sistemtika dan alur pelaksanaan Program dan Kegiatan pada PD;
- c. Penyediaan struktur anggaran yang kurang memadai.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Dinas indikator Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target

capaian program Renstra Dinas Kominfo Tahun 2026:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kominfo Tahun 2026 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2026 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Dinas Kominfo tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2026 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Dinas Kominfo mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2026 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.

d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Dinas Kominfo tahun 2026. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang realtime, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Realokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo dan Pencapaian Renstra Diskominfo s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	BB	A	A	100	A	A	100%
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	98%	97%	98%	98%	100	99%	99%	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	14	14	100	16	16	100
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100	12	12	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	10000%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40	25	30	0	100	35	35	100
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	2	0	100	2	2	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5	5	100	5	5	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100	100	100	100	100	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	70	40	50	50	100	65	65	100

			Konsultasi SKPD								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	5	10	0	100	15	15	100
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	10	10	10	100	10	10	100
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	10	10	10	100	10	10	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1			100			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	2	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	10	10	10	100	10	10	100
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5	5	0	100	5	5	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	0	100			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5	0	100			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan		15	15	15		15	15	100

		Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15				100			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30	26	26	26	100	17	17	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	3	3	100	3	3	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	12	12	100	12	12	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	12	12	100	12	12	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	59%	88%	88%	100	100%	100%	100%
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	100%	90%	95%	95%	100	100%	100%	100%
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	7	6	6	6	100	6	6	100
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	121	61	81	81	100	101	101	100
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	17	10	15	15	100	17	17	100
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan	45	43	45	45	100	45	45	100

		Komunitas	Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	25%	10%	15%	15%	100	20%	20%	100%
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi	3	2	2	2	100	3	3	100
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25	10	15	15	100	20	20	100
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10	0	0	0	100	5	5	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Data Sektoral	100%	90%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	2	2	2	100	2	2	100
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	64%	60%	62%	62%	100	63%	63%	100%
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang TIK serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan informasi	70%	70%	70%	70%	100	70%	70%	100%
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1000	500	600	600	100	850	850	100

			Kapasitas Bandwith/Internet Daerah								
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)	90%	80%	80%	80%	100	85%	85%	100%
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90	34	56	56	100	79	79	100
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4	4	4	4	100	4	4	100
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1	1	1	1	100	1	1	100
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	90	34	56	56	100	79	79	100
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	93	72	84	84	100	86	86	100
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	170	155	160	160	100	165	165	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down. Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 66 Tahun 2021 tentang SOTK, Dinas Kominfo sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SESUAI DENGAN SOTK

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan :
 - 1. Meningkatnya e-government yang terintegrasi
 - 2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Diskominfo
- b). Sasaran :
 - 1. Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah
 - 2. Meningkatnya Kualitas Data Daerah
 - 3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Diskominfo
- c). Indikator :
 - Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah
 - 1. Level Keterbukaan Informasi Publik
 - 2. Cakupan Layanan Telekomunikasi
 - Meningkatnya Kualitas Data Daerah
 - 1. Tingkat Kematangan Statistik Sektor
 - Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Diskominfo
 - 1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

- a). Tujuan : 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
2. Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik
- b). Sasaran : 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital
3. Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
4. Meningkatnya keamanan informasi
- c). Indikator Kinerja : • Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Level Keterbukaan Informasi Publik
1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
• Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital
1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia
2. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
• Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
• Meningkatnya keamanan informasi
1. Indeks Keamanan Daerah
2. Indeks SPBE (terkait keamanan)

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2026	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang berbasisan Elektronik	Level Keterbukaan Informasi Publik	46	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Realisasi 2023-2024 Mencapai Target.
2.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Ada	80 %	90%	100%	Ada	80%	90%	100%	Realisasi 2023-2024 Mencapai Target.
3.	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	100	Terkel ola	Terdef inis	Terdef inisi	100	Terkel ola	Terdef inis	Terdef inisi	Realisasi 2023-2024 Mencapai Target.
4.	Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	100	A	A	A	100	A	A	A	Realisasi 2023-2024 Mencapai Target.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kominfo merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Dinas Kominfo adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kominfo Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

N o	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Level Keterbukaan Informasi Publik	%	Informatif	Informatif	100	Mencapai Target
2	Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Jumlah	80 %	84%	105	Melebihi Target
3	Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	%	Terkelola	Terkelola	100	Mencapai Target
4	Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	%	A	A	100	Mencapai Target

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :

- 1) Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- 2) Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- 3) Meningkatnya Kualitas Data Daerah
- 4) Meningkatnya Kualitas Data Daerah

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :

- 1) Tidak ada capaian kinerja yang tidak memenuhi target

I. Sasaran Strategis Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Level Keterbukaan Informasi Publik	%	Informatif	Informatif	100	Mencapai Target

Analisis Capaian Indikator Kinerja

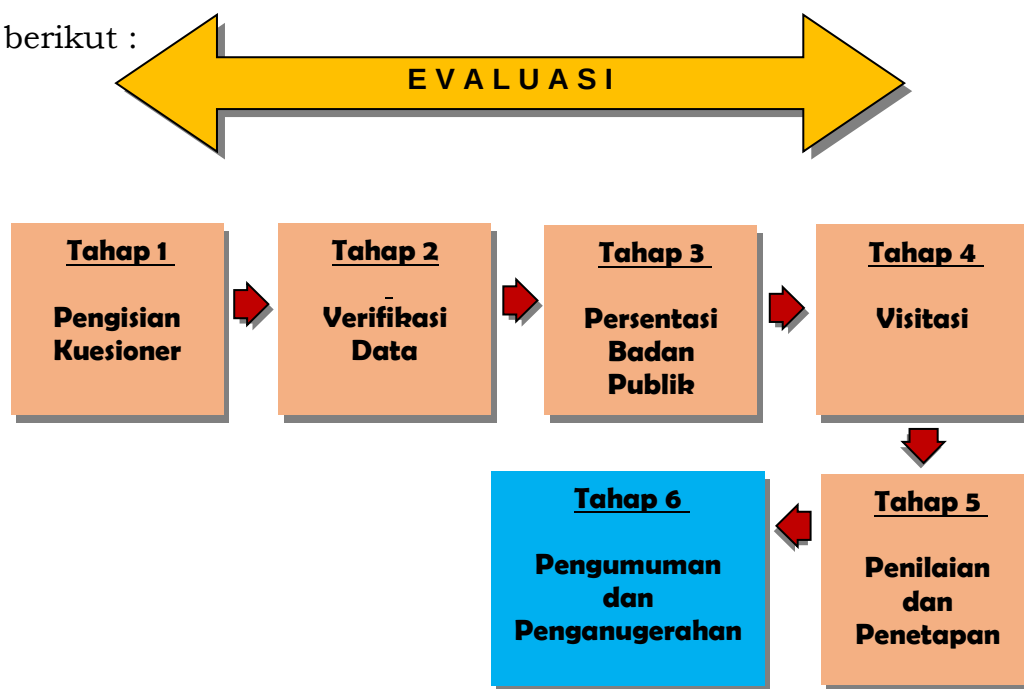
Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diukur dengan Level Keterbukaan Informasi Publik kabupaten padang Pariaman. Indikator ini menggambarkan keterbukaan Informasi yang diberikan kepada Publik atau Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan Informasi tentang Pembangunan daerah atau Informasi lainnya terkait Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dapat diakses secara luas oleh Masyarakat Padang Pariaman.

Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakanlainnya yang diakses sistem informasi dalam setiap pelayanan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Penilaian indikator ini berdasarkan Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi yang dilakukan oleh Badan Komisi Informasi yaitu Badan yang bertugas dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) guna mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI SLIP), dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik. Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dilaksanakan sesuai

tahapan yang ditentukan. Akhir dari seluruh tahapan yaitu penganugerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik.

Tahapan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Komisi Informasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :



Keterbukaan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Upaya Peningkatan

Dalam mencapai indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Ujung Tombak penyebarluasan Informasi Publik, terus melakukan pembenahan dan peningkatan diseluruh aspek.

Dukungan komitmen semua pihak, terutama dukungan pimpinan, sehingga dapat dilahirkannya berbagai kebijakan, merupakan kunci utama keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dibuktikan dengan Penerimaan Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi dengan Kategori Informatif.

Keberhasilan ini tercapai dikarenakan banyak hal faktor yang dapat dijabarkan sebagai berikut;

- **Peranan PPID Utama dan PPID Pembantu**

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu sangat mendukung keberhasilan capaian ini, Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai PPID Utama sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 217/ KEP/ BPP/2024 tentang Penetapan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana kabupaten padang pariaman. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di Satuan kerja Perangkat Daerah Padang Pariaman.

Tujuan dari dibentuknya PPID adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi public;
3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik;
4. Memberikan standar bagi Badan Publik dilingkungan pelayanan informasi public Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang cepat, tepat, dan sederhana;
5. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan, diharapkan Badan Publik atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan Pemerintah yang baik. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

- **Sistem Informasi Pemerintahan dan Media Sosial**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan Aplikasi yang digunakan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dalam penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah, adapun aplikasi yang digunakan diantaranya;

- a. Website Pemkab Padang Pariaman;
- b. Sistem Aplikasi PPID Utama dan PPID Pembantu;
- c. Aplikasi Satu Data Padang Pariaman;
- d. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIL). JDIL bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi hukum yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- e. Sebanyak 72 Aplikasi Layanan Publik. Selain Sistem Informasi Aplikasi Layanan Publik yang dibuat oleh Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Komunikasi dan Informatika juga Memanfaatkan Sosial Media Sebagai Media Penyebarluasan Informasi Publik seperti Media Sosial Instagram, Facebook, Youtube Tiktok, dan sebagainya.

- **Kerjasama Pemerintah dengan Media Massa**

Selain Faktor Internal factor eksternal yang mempengaruhi tercapainya Indikator Kinerja Utama Keterbukaan Informasi Publik adalah Kerjasama Media Massa. Media massa memiliki sebuah perananan penting dalam penyediaan informasi kepada masyarakat dan merupakan salah satu bentuk layanan publik dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesehatan, pendidikan, hiburan, ekonomi hingga politik.

Prinsip kesetaraan dalam bekerja sama diperlukan di antara

media dan pemerintah karena kedua pihak tersebut saling membutuhkan. Pihak pemerintah membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan apa yang telah dikerjakan kepada masyarakat dan pihak media sendiri membutuhkan pemerintah sebagai sumber berita.

Fungsi media massa bagi Pemerintahan diantaranya:

1. **Fungsi Informasi**, Media massa memiliki fungsi penyebaran informasi dan fungsi ini merupakan fungsi utama. Karena informasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat. Dengan adanya informasi maka media menawarkan sebuah topik tertentu yang telah dikemas sedemikian rupa untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
2. **Fungsi Pengawasan**, Media memberikan sebuah informasi mengenai kesalahan-kesalahan atau kemungkinan yang terjadi di dalam Pemerintahan, masyarakat, maupun otoritas tertentu. Dari berita atau informasi yang ada maka masyarakat dapat memperkirakan dan mengetahui kemungkinan dampak bahkan ancaman yang akan terjadi kepada mereka. Biasanya fungsi ini lebih ditujukan kepada pemerintah untuk mengawasi kinerja hingga kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dan bagaimana dampak kedepannya untuk masyarakat. Sehingga pemberitaan dari Media Massa dapat menjadi Bahan Evaluasi untuk membuat Kebijakan.
3. **Fungsi Persuasi**, Media massa meliki fungsi yang cukup kuat dalam memengaruhi opini publik. Opini publik dapat terbentuk sesuai dengan media massa apa yang mereka baca dan yakini. Hal tersebut membuat opini atau pandangan masyarakat akan tergambarkan sesuai media massanya.

II. Sasaran Strategis Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Jumlah	80 %	84%	105	Melebihi Target

Analisis Capaian Indikator Kinerja

Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah diukur dengan Cakupan Layanan Telekomunikasi. Indikator ini menggambarkan layanan Telekomunikasi dapat di akses oleh masyarakat.

Cakupan layanan telekomunikasi pemerintah daerah dapat merujuk pada cakupan layanan telekomunikasi di suatu wilayah atau daerah. Cakupan Layanan Telekomunikasi digunakan dalam melihat kemajuan suatu daerah adalah akses terhadap teknologi dan informasi. Dalam memperluas Layanan Telekomunikasi dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengumpulan data dan membantu perizinan pembangunan Menara Telekomunikasi bagi Provider. Menara telekomunikasi, sering disebut sebagai tower telekomunikasi, adalah struktur tinggi yang berfungsi untuk mendukung berbagai peralatan dan antena yang digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel.

Untuk saat ini terdapat 190 Menara dari berbagai provider yang tersebar sebanyak 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam juga melakukan pemetaan wilayah yang masih Blank Spot atau yang tidak mendapat sinyal dari menara telekomunikasi yang membatasi pengguna layanan seluler untuk melakukan komunikasi. Setidaknya dari 17 Kecamatan di kabupaten Padang Pariaman masih terdapat sekitar 16% wilayah yang masih belum mendapatkan sinyal dari Menara telekomunikasi mengingat luasnya wilayah kabupaten padang Pariaman, belum tercover seutuhnya oleh 190 menara tersebut.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah sebesar 1334,51 km² yang terdiri dari 17 kecamatan dengan 103 Nagari dan 600 Jorong

(Dusun/ Kampung). Kemampuan Rata-rata Sinyal dari masing masing BTS atau Menara Telekomunikasi, Masing-masing BTS bisa menjangkau pengguna hingga radius 7 km dan mampu melayani pelanggan dalam waktu bersamaan hingga 200 pelanggan sehingga jika dihitung dari Luas Wilayah Kabupaten Padang Pariaman setidaknya minimal dibutuhkan 250 Menara. Untuk menutupi hal tersebut Dinas komunikasi dan informatika memberikan layanan wifi corner/wifi gratis yang berada di Kantor Kecamatan serta dapat di akses oleh masyarakat.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Upaya Peningkatan

Dalam mencapai indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pendorong meningkatnya implementasi E-Government di Kabupaten Padang Pariaman, terus melakukan pembenahan dan peningkatan diseluruh aspek.

Dukungan komitmen semua pihak, terutama dukungan pimpinan, sehingga dapat dilahirkannya berbagai kebijakan, merupakan kunci utama keberhasilan cakupan layanan telekomunikasi di Padang Pariaman. Hal ini dibuktikan dengan nilai persentase cakupan Layanan Telekomunikasi, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.

Hal ini di sebabkan upaya pemerintah kabupaten padang pariaman dalam meperluas penyebarluasan internet, adapun secara historical penyebaran jaringan internet yang disediakan Kominfo adalah sebagai berikut :

1. Koneksi Antar OPD

a. Tahun 2017 Januari – Oktober

Koneksi yang terhubungan antar OPD pada tahun 2017 masih menggunakan Fasilitas dari Bagian PDE yaitu:

- Jalur Fiber Optik dari Kantor Bupati ke DPKA
- Jalur Radio dari Kantor Bupati ke Dinas Kesehatan
- Jalur Radio dari Dinas Kesehatan ke Dinas pariwisata dan Olah Raga
- Jalur Radio dari Dinas Kesehatan ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan

b. Tahun 2017 November - 2018 Agustus

Koneksi Berubah menjadi Fiber Optik ke seluruh Dinas, Badan, dan Kantor serta RSUD sebanyak 40 site

- c. Tahun 2018 Agustus – Sekarang
Koneksi bertambah menjadi Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Puskesmas yang semula 40 site menjadi 64 site.
- d. Tahun 2022 Januari – sekarang
Koneksi bertambah menjadi Dinas, Badan, Kantor, RSUD, Puskesmas dan 19 Sekolah SMP yang semula 64 site menjadi 83 site.

Selain jaringan internet faktor utama yang mempengaruhi cakupan layanan telekomunikasi adalah Keberadaan Menara BTS sebanyak 190 unit yang berada di Kabupaten Padang Pariaman sebagai pemancar jaringan telekomunikasi di kabupaten padang pariaman.

III. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Data Daerah Diskominfo

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	Indeks	Terkecila	Terkecila	100 %

Analisis Pencapaian Analisis Kinerja

Dalam mengukur tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Data Daerah, disepakati indikator yang digunakan adalah Tingkat Kematangan Statistik Sektoral untuk mengukur Tingkat Kematangan Statistik Sektoral dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang merupakan suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertujuan untuk:

1. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik;

2. Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah; meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan;
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistic pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Upaya Peningkatan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja sasaran ini tidak lain adalah komitmen pimpinan dan seluruh stakeholder dalam meningkatkan kualitas data daerah Kabupaten Padang Pariaman. Upaya peningkatan pengelolaan kualitas data daerah terus dilakukan. Dengan membentuk kelembagaan forum data pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang merupakan wadah berbagai elemen pemerintahan yang merupakan stakeholder pengelolaan data daerah untuk mencapai kualitas data yang diharapkan.

Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Pengelolaan Statistik Daerah juga terus dilakukan. Terakhir dilaksanakan pembinaan kepada dua Perangkat Daerah sebagai pilot project untuk evaluasi pelaksanaan Statistik Sektoral Daerah, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.

Untuk mendukung pelaksanaan statistik sektoral juga telah dilakukan pembinaan Nagari/Desa Cinta Statistik, yang sampai dengan akhir tahun 2024 telah dilakukan pembinaan terhadap 56 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

IV. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelaporan

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelaporan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A	A	100 %

Dalam mengukur tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelaporan Diskominfo, disepakati indikator yang digunakan yaitu : Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Upaya Peningkatan

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Pelaporan Diskominfo, telah dianggarkan pendanaan sebesar Rp. 407.483.681,- pada satu program, 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Dalam Upaya mencapai target sasaran Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Pelaporan Diskominfo, sumberdaya yang dibutuhkan berupa Kebijakan, SDM dan Sarana Prasarana Peralatan Kerja dirasa cukup, namun tetap ada beberapa kekurangan yang perlu dijadikan perhatian terutama disisi Sumberdaya Manusianya, baik kuantitas maupun kualitas.

Saat ini pejabat dan staf yang bertugas mengelola keuangan, utamanya bendahara, seluruhnya merangkap jabatan sebagai staf fungsional tertentu. Sehingga cukup menghambat percepatan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam mengelola sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sangat diperlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap seluruh pegawai sehingga implementasi SAKIP dapat lebih sempurna dan berdampak signifikan terhadap pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat dan Pembangunan.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 :

Tabel 2.8
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2026	2026	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Komunikasi dan Informatika									
1.	Indeks E-Government /SPBE	2,44	3,12	3,53	4	2,62	3,51	3,53	4	Melebihi Target
2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	88	100	100	100	88	100	100	100	Mencapai Target
3.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	62	63	64	65	65	67	64	65	Mencapai Target
4.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	78	79	80	81	80	84	80	81	Melebihi Target
5.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	40	42	44	46	40	42	44	46	Mencapai Target
6.	Jumlah jaringan komunikasi	112	112	112	112	119	119	119	119	Melebihi Target
7.	Jumlah penyiaran radio Lokal	3	3	3	3	3	3	3	3	Mencapai Target
8.	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	Mencapai Target
	Urusan Statistik									
9.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Mencapai Target
10.	Buku ”kabupaten dalam angka”	1	1	1	1	1	1	1	1	Mencapai Target
11.	Buku ”PDRB kabupaten”	1	1	1	1	1	1	1	1	Mencapai Target
	Urusan Persandian									
12.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	68,18	79,55	90,91	100	25	25	60	60	Tidak mencapai target

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Dinas Kominfo dari Komunikasi dan Informatika terdapat indikator- indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo antara lain :
 1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi dan kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi.
 2. Belum adanya fasilitas atau peralatan sandi mengikuti standar Badan Siber dan Sandi Negara
 3. Anggaran untuk belanja belum cukup untuk melakukan belanja peralatan persandian serta peningkatan kompetensi sdm

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi

secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk internal perangkat daerah, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Dinas Kominfo per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RENJA Tahun 2026 (T-C 31)

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Tahun 2026	
				Target	Rp
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas					
Tujuan 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, akuntabel dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi				
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah				
	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	100	3,800,000,000
	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100	100	
	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	
Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Transformasi Digital Layanan Publik Yang Handal	Indeks SPBE	%	4	4	2,700,000,000
	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi)	Nilai	-	2	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	70	72	176,350,000

	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	92	93	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	78	81	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	92	93	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (TIK)	%	100	100	2,418,210,000
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Egov)	%	79	80	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	3	3	55,440,000
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	2	3	50,000,000

	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2	3	
--	---------------------------------------	---	---	---	--

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Kominfo Namun dalam proses ini Dinas Kominfo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Tidak Ada	-	-	-	-
	Tidak Ada	-	-	-	-
	Tidak Ada	-	-	-	-
	Tidak Ada	-	-	-	-

Dalam Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program

dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan yang telah dirumuskan dan dibukukan didalam dokumen Renstra Diskominfo kabupaten Padang Pariaman Periode 2025-2029. Adapun Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo untuk tahun 2026 dirumuskan sesuai matrik berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik;	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Masyarakat Digital	48,87
		Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	50,35
			Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,0
			Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Daerah	2,5
				Indeks SPBE (terkait keamanan)	3,0
	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,19

3.2 Program Pembangunan Daerah yang mendukung Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2026 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4), memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat

daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menysasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2026 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses

pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2026 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskan dan ditetapkanlah rekapitulasi program secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Pedanaan yang mendukung Tujuan dan Sasaran Renja
Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman Tahu 2026.

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Pagu Indikatif Tahun	
		2026	Proyeksi 2027
		(Rp)	(Rp)
Non Urusan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,330,281,643.00	3,800,000,000	2,750,000,000
Urusan Komunikasi Dan Informatika			
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1,169,230,000.00	176,350,000	188,985,000
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,696,268,750.00	2,418,210,000	2,100,031,000
Urusan Statistik			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	9,240,000.00	55,440,000	60,984,000
Urusan Persandian			
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	18,050,000.00	50,000,000	50,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Seluruh Rencana Kerja dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman akan dibiayai dengan sumber dana APBD dengan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2026 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp7,895,539,240,- (Terbilang Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan dua ratus empat puluh rupiah). Dengan rincian sebagai Berikut :

Tabel 4.1 Rencana Awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2026

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	TARGET 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	
Dinas Komunikasi Dan Informatika				6,500,000,000			5,150,000,000	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				3,800,000,000			2,750,000,000	
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				2.700.000.000			2.400.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Kab. Padang Pariaman	100	3,800,000,000	Dana Alokasi Umum	100	2,750,000,000	Diskominfo
	Survey Kepuasan Masyarakat		100			100		
	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti		100			100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Padang Pariaman		80,000,000	Dana Alokasi Umum		65,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	4	55,000,000	Dana Alokasi Umum	4	35,000,000	Diskominfo
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Kab. Padang Pariaman	2	25,000,000	Dana Alokasi Umum	2	15,000,000	Diskominfo

Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	TARGET 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paganar	-	-	Dana	1	5,000,000	Diskominfo
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Paganar	-	-		1	5,000,000	Diskominfo
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paganar	-	-		1	5,000,000	Diskominfo
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Paganar		2,390,000,000			2,303,500,000	Diskominfo
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paganar	31	2,250,000,000	Dana Alokasi Umum	31	2,193,500,000	Diskominfo
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paganar	12	125,000,000		12	100,000,000	Diskominfo
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paganar	-	-	Dana Alokasi Umum	-	-	Diskominfo
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Kab. Paganar	5	15,000,000	Dana Alokasi Umum	5	10,000,000	Diskominfo

Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55,000,000			55,000,000	Diskominfo
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Padang Pariaman	31	55,000,000	Dana Alokasi Umum	31	55,000,000	Diskominfo
Administrasi Umum Perangkat Daerah				338,500,000			106,500,000	Diskominfo
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	1	2,500,000	Dana Alokasi Umum	1	1,000,000	Diskominfo
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	1	25,000,000	Dana Alokasi Umum	-	-	Diskominfo
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	1	15,000,000	Dana Alokasi Umum	1	5,000,000	Diskominfo
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	1	3,500,000	Dana Alokasi Umum	1	500,000	Diskominfo
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Padang Pariaman	36	185,000,000		36	100,000,000	Diskominfo
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Padang Pariaman	1,000	87,500,000	Dana Alokasi Umum	-	-	Diskominfo
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Padang Pariaman	2	20,000,000	Dana Alokasi Umum	-	-	Diskominfo
Pengadaan		Kab.		776,500,000		-	90,000,000	Diskominfo

Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	TARGET 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Padang Pariaman						fo
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	1	452,500,000			90,000,000	Diskominfo
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	2	34,000,000	Dana Alokasi Umum	-	-	Diskominfo
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	2	100,000,000	Dana Alokasi Umum	2	45,000,000	Diskominfo
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	10	190,000,000		3	45,000,000	Diskominfo
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Padang Pariaman		115,000,000			110,000,000	Diskominfo
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Padang Pariaman	6	15,000,000	Dana Alokasi Umum	3	15,000,000	Diskominfo
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	-	-	Dana Alokasi Umum		-	Diskominfo
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	-	-	Dana Alokasi Umum	-	-	Diskominfo
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	13	100,000,000	Dana Alokasi Umum	13	100,000,000	Diskominfo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Kab. Padang Pariaman		45.000.000			20.000.000	Diskominfo

Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	TARGET 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	
Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Padang Pariaman	-	-	Dana Alokasi Umum	-	-	Diskominfo
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Padang Pariaman	2	15,000,000	Dana Alokasi Umum	2	10,000,000	Diskominfo
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Padang Pariaman	10	5,000,000	Dana Alokasi Umum	5	5,000,000	Diskominfo
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Padang Pariaman	10	25,000,000	Dana Alokasi Umum	10	5,000,000	Diskominfo
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Kab. Padang Pariaman		176,350,000			188,985,000	Diskominfo
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Kab. Padang Pariaman		176,350,000			188,985,000	Diskominfo
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Padang Pariaman	10	100,000,000	Dana Alokasi Umum	10	125,270,000	Diskominfo
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Padang	5	2,500,000	Dana Alok	5	2,500,000	Diskominfo

Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		g Paria man			asi Umu m			
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Padan g Paria man	50	5,000,000	Dana Alok asi Umu m	50	5,000,000	Diskomin fo
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Kab. Padan g Paria man	-	-	Dana Alok asi Umu m	-	-	Diskomin fo
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Padan g Paria man	50	32,700,000	Dana Alok asi Umu m	65	20,065,000	Diskomin fo
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kab. Padan g Paria man	-	-	Dana Alok asi Umu m	-	-	Diskomin fo
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kab. Padan g Paria man	1	5,000,000	Dana Alok asi Umu m	1	5,000,000	Diskomin fo
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Padan g Paria man	1	5,000,000	Dana Alok asi Umu m	1	5,000,000	Diskomin fo
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Padan g Paria man	10	5,000,000		10	5,000,000	Diskomin fo
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda	Kab. Padan g Paria man	-	-	Dana Alok asi Umu m	-	-	Diskomin fo

Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	TARGET 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	komunikasi prioritas Pemerintah Daerah							
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Padang Pariaman	25	21,150,000	Dana Alokasi Umum	25	21,150,000	Diskominfo
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Kab. Padang Pariaman		2,418,210,000			2,100,031,000	Diskominfo
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah		Kab. Padang Pariaman		2,418,210,000			2,100,031,000	Diskominfo
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Padang Pariaman	10	25,000,000	Dana Alokasi Umum	10	25,000,000	Diskominfo
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kab. Padang Pariaman	5	55,000,000		5	55,000,000	Diskominfo
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Kab. Padang Pariaman	5	50,000,000	Dana Alokasi Umum	5	50,000,000	Diskominfo
Koordinasi pelaksanaan Manajemen Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Padang Pariaman	2	68,210,000	Dana Alokasi Umum	2	68,210,000	Diskominfo
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan	Kab. Padang Pariaman	1	50,000,000	Dana Alokasi Umum	1	50,000,000	Diskominfo

Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	TARGET 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	
	Dinas Kominfo							
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman	43	1,850,000,000	Dana Alokasi Umum	43	1,551,821,000	Diskominfo
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan daerah Cerdas	Kab. Padang Pariaman	2	25,000,000		2	25,000,000	Diskominfo
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Padang Pariaman	-	-		-	-	Diskominfo
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kab. Padang Pariaman	10	75,000,000		10	55,000,000	Diskominfo
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman	1	25,000,000		1	25,000,000	Diskominfo
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Padang Pariaman	1	10,000,000		1	10,000,000	Diskominfo
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung	Kab. Padang Pariaman	1	25,000,000		1	25,000,000	Diskominfo

Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Layanan Pemerintah Daerah	man						
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Kab. Padang Pariaman	10	160,000,000		10	160,000,000	Diskominfo
URUSAN STATISTIK								
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Kab. Padang Pariaman		55,440,000			60,984,000	Diskominfo
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah daerah		Kab. Padang Pariaman		55,440,000			60,984,000	Diskominfo
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kab. Padang Pariaman	10	5,000,000		15	5,000,000	Diskominfo
Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kab. Padang Pariaman	5	5,000,000	Dana Alokasi Umum	10	5,000,000	Diskominfo
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Kab. Padang Pariaman	5	5,440,000	Dana Alokasi Umum	10	5,984,000	Diskominfo
Peningkatan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kab. Padang Pariaman	65	15,000,000	Dana Alokasi Umum	70	15,000,000	Diskominfo
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Padang Pariaman	2	20,000,000	Dana Alokasi Umum	2	25,000,000	Diskominfo
Koordinasi dan kolaborasi	Jumlah laporan penyelenggaraan		1	5,000,000		1	5,000,000	Diskominfo

Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
dalam penyelenggaraan statistik sektoral	forum satu data daerah							
URUSAN PERSANDIAN								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Kab. Padang Pariaman		50,000,000			50,000,000	Diskominfo
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		Kab. Padang Pariaman		40,000,000			40,000,000	Diskominfo
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Padang Pariaman	1	10,000,000		1	10,000,000	Diskominfo
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Padang Pariaman	8	10,000,000		1	10,000,000	Diskominfo
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab. Padang Pariaman	1	10,000,000			10,000,000	Diskominfo
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan	Kab. Padang Pariaman	1	10,000,000		1	10,000,000	Diskominfo

Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana	Tar get	Pagu Indikatif (Rp)	
	dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.							
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah		Kab. Padang Pariaman		10,000,000			10,000,000	Diskominfo
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kab. Padang Pariaman	1	10,000,000		1	10,000,000	Diskominfo

Adapun beberapa faktor umum yang mendorong efisiensi anggaran dalam pelaksanaan RKPD Perubahan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Fiskal dan Peningkatan Kebutuhan Belanja:

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Terbatas:** Seperti banyak daerah lain, Padang Pariaman saat ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan PAD secara signifikan. Ketergantungan pada dana transfer dari pusat (Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK) seringkali membuat ruang fiskal daerah terbatas.
- **Peningkatan Kebutuhan Belanja:** Di sisi lain, kebutuhan belanja untuk layanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), program pengentasan kemiskinan, penanganan dampak perubahan iklim (jika relevan), dan program prioritas daerah lainnya terus meningkat. Kesenjangan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih efisien.

2. Arahan dan Kebijakan Pemerintah Pusat:

- **Fokus Nasional pada Efisiensi:** Pemerintah pusat seringkali mengeluarkan arahan atau kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran, optimalisasi belanja, dan meningkatkan kualitas belanja (belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat).
- **Pengawasan dan Evaluasi:** Adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi dari pemerintah pusat (misalnya melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) terkait pengelolaan keuangan daerah juga mendorong pemda untuk lebih berhati-hati dan efisien dalam menggunakan anggaran.

3. Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi Publik:

- **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Masyarakat semakin kritis dan menuntut akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat daerah. Tekanan publik ini mendorong pemerintah daerah untuk memastikan anggaran digunakan seefektif dan seefisien mungkin.
- **Peran Media dan LSM:** Media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah, yang turut mendorong praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik.

4. Optimalisasi Program dan Kegiatan:

- **Evaluasi Program yang Kurang Efektif:** Pemerintah daerah mungkin melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang selama ini berjalan untuk mengidentifikasi program yang tumpang tindih, kurang berdampak, atau tidak efisien. Program-program seperti ini bisa jadi dihentikan, digabungkan, atau direstrukturisasi.
- **Prioritas Pembangunan Daerah:** Adanya perubahan atau penajaman prioritas pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Suhatri Bur (jika masih menjabat atau kepemimpinan baru) dapat mengarahkan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang dianggap lebih strategis, sehingga memerlukan efisiensi di sektor lain.

5. Penerapan Teknologi dan Digitalisasi:

- **E-Budgeting dan E-Procurement:** Implementasi sistem *e-budgeting* dan *e-procurement* yang lebih baik dapat membantu menekan potensi kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

- **Analisis Data untuk Pengambilan Keputusan:** Penggunaan data untuk analisis kebutuhan dan evaluasi program dapat membantu pemerintah daerah membuat keputusan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.

6. **Kondisi Ekonomi Makro:**

- **Inflasi atau Perlambatan Ekonomi:** Jika terjadi tekanan inflasi yang tinggi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan daerah dan meningkatkan biaya pengadaan barang/jasa, sehingga efisiensi menjadi sebuah keharusan.

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan. Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi

perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Parit Malintang, 29 Oktober 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



ZAHIRMAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda. NIP. 19710524 199703 1 002

